

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN
DAN AUDIT INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SKPD DI PEMERINTAH
KABUPATEN BATANGHARI**

Sri Dewi Yanti¹⁾, H. Junaidi dan Asep Machpudin²⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi

²⁾Dosen Pembimbing

ABSTRACT

This research aims to determine whether the application of performance-based budgeting, budget goal clarity and internal audit reports can affect the quality of performance accountability of government institutes in Batanghari. The subjects were the personal who top of budget, official of budget and team which discuss of LAKIP Batanghari in government institutes in Batanghari, data was collected using a questionnaire. The analysis method used was statistic quantitative, to see whether the application performance-based budgeting, budget goal clarity and internal auditor affect the quality of performance accountability report of government institutes in Batanghari by using empirical studies. Primary data were obtained from the research were analyzed by using Partial Least Square method with the help of software SMART PLS.

This research has 3 discoveries results, they are 1) the application of erformance- based budgeting, budget goal clarity and internal audit simultaneously affect the quality of LAKIP SKPD, 2) adoption performance-based budgeting and budget goal clarity partially affect the quality of LAKIP SKPD, and 3) models Partial Least Square in this research showed the indicators reflecting internal audit are positive and significant. But a direct influence on the quality of LAKIP SKPD very weak and insignificant.

Keywords : budget, internal audit, LAKIP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan audit intern dapat mempengaruhi kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD di pemerintah kabupaten Batanghari. Subyek penelitiannya adalah pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan tim LAKIP Kabupaten di pemerintah kabupaten Batanghari, data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah statistic kuantitatif, untuk melihat apakah enerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan audit intern mempengaruhi kualitas LAKIP SKPD di kabupaten Batanghari dengan menggunakan studi empiris. Data primer diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan Partial Least Square dengan bantuan software SMART PLS.

Penelitian ini memiliki 3 penemuan hasil, yakni ; 1) penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan audit intern secara simultan mempengaruhi kualitas LAKIP SKPD, 2) penerapan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran secara parsial mempengaruhi kualitas LAKIP SLPD, dan 3) model Partial Least Square pada penelitian ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang merefleksikan audit intern merupakan indikator positif dan signifikan. Namun pengaruh langsung audit intern terhadap kualitas LAKIP SKPD sangat lemah dan tidak signifikan.

Kata Kunci : Anggaran, audit intern, LAKIP

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi, selaras dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanahkan kepada setiap daerah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk dari pertanggung jawaban pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas publik atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun yang berkenaan. Secara substantive LAKIP ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, bersih serta bertanggung jawab. Selain itu, melalui LAKIP ini diharapkan dapat mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Prinsip akurat, handal dan dapat ditelusuri merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai kriteria LAKIP yang berkualitas. Jika laporan yang disampaikan tidak memenuhi kriteria di atas, maka laporan yang dibuat dan disampaikan tersebut tidak sesuai dengan realisasi. Menurut LAN dan BPKP (2000), kriteria LAKIP yang berkualitas harus memenuhi prinsip – prinsip laporan yang baik sebagai berikut:

1. Relevan
2. Konsisten
3. Tepat Waktu
4. Dapat dimengerti
5. Dapat dipertanggungjawabkan
6. Mengikuti standar laporan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kejelasan sasaran anggaran harus memenuhi prinsip dokumen pertanggungjawaban yang lengkap

dan sah sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 pasal 132 ayat (1), (2) dan (3). Prinsip dapat diverifikasi dan akurasi serta handal merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai kriteria LAKIP yang berkualitas. Data capaian kinerja baik indikator input, output dan outcome yang disajikan dalam LAKIP SKPD saat dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerjanya, capaian kinerja tersebut dapat diverifikasi kebenarannya melalui audit intern berupa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, audit tersebut mempunyai peranan yang sangat penting sebagai *assurance/jaminan* atas efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Terkait dengan peraturan tersebut dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kabupaten Batanghari tidak bisa melepaskan kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang ada yaitu membuat dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD. Berikut adalah hasil evaluasi atas implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dapat dilihat pada tabel. 1 berikut ini:

Tabel. 1
Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Batanghari Tahun 2013

No	Kinerja LAKIP	Jumlah SKPD	Persentase
1	Memuaskan	1	3,45 %
2	Sangat Baik	1	3,45 %
3	Baik, perlu sedikit perbaikan	6	20,69 %
4	Cukup Baik, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	11	37,93 %
5	Agak kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar	6	20,69 %
6	Kurang, perlubanyak sekali perbaikan	4	13,79 %
	TOTAL	29	100%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Batanghari

Laporan hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Batanghari sebagaimana tabel 1.1 menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Batanghari tahun 2013 menunjukkan hasil yang belum optimal, total hanya 8 SKPD saja yang memperoleh nilai memuaskan, sangat baik dan baik hanya 27,59 %. Persentase terbesar yaitu 37,93% atau sebanyak 11 SKPD berada pada level cukup baik dan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar, bahkan masih ada 4 SKPD atau 13,79 % yang kurang memuaskan dan perlu banyak sekali perbaikan. Dan dalam evaluasi dan analisa kerja terhadap pelaksanaan APBD tahun

anggaran 2013 diperoleh capaian akhir kinerja sasaran sebesar 54,90 meningkat dari tahun lalu sebesar 50,21 dengan predikat nilai CC. Nilai ini menggambarkan bahwa kinerja Pemkab Batanghari dalam sasaran capaian termasuk dalam kategori CC (Cukup baik). Ini berarti kelengkapan dokumen yang merupakan bukti *outcome* tidaklah cukup dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Namun juga pelaksanaan sistem dan pelaku sistem tersebut haruslah dapat melakukan tugas-tugasnya secara baik, efektif dan efisien. Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya sebatas saat hari pelaksanaan, tetapi harus mempunyai dampak setelahnya serta berkelanjutan. Jika semua elemen dalam instansi pemerintah telah bersinergi dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka hasil evaluasi kinerja akan memuaskan.

Pada IHPS BPK RI (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) I Tahun 2014 mengungkapkan sebanyak 6.531 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 8.323 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp30,87 triliun. Dari jumlah kasus ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.900 kasus senilai Rp25,74 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2014 menemukan 6 kasus ketidak hematian/ ketidak ekonomisan senilai Rp 77,90 miliar, 5 kasus ketidak efisienan, dan 173 kasus ketidak efektifan senilai Rp419,59 miliar. Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 45 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi kehematan/ ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta 10 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 42,28 miliar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Apakah anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan audit intern secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari?
- 1.2.2 Apakah anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari?
- 1.2.3 Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari?

- 1.2.4 Apakah audit intern berpengaruh terhadap kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menguji secara simultan apakah penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan audit intern berpengaruh terhadap kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari.
- 1.3.2 Untuk menguji apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari.
- 1.3.3 Untuk menguji apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari.
- 1.3.4 Untuk menguji apakah audit intern berpengaruh terhadap kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- 1.4.1 Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam akuntansi sector public khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah.
- 1.4.2 Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan khususnya dalam peningkatan akuntabilitas pemerintah kabupaten Batanghari sehingga dapat melakukan perbaikan dan pembenahan dalam penyusunan anggaran, pertanggungjawaban belanja serta mampu mengefektifkan audit intern.
- 1.4.3 Bagi akademisi dan peneliti lanjutan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut SK LAN No.239/IX/6/8/2003 tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan tingkat keberhasilan kinerja yang dicapainya.

Menurut LAN dan BPKP (2000) LAKIP yang berkualitas harus memenuhi prinsip-prinsip laporan yang baik sebagai berikut :

a) *Relevance* (relevan) berhubungan dengan tujuan dari suatu organisasi dan tergantung dari kegunaan dari informasi itu. Sebagai contoh, informasi yang berhubungan dengan produksi untuk bulan ini mungkin sangat relevan bagi manajer produksi yang berkepentingan mengejar target produksi.

b) *Accuracy/reliability* (akurat dan handal). Informasi yang bebas dari kesalahan dan tepat dapat dikatakan akurat. Pengendalian dan ukuran-ukuran keamanan data yang terbangun dalam sistem informasi sangat diyakini sebagai cara yang efektif untuk memperoleh keakuratan informasi.

c) *Consistency/comparability* (konsisten/dapat diperbandingkan). Laporan dapat memberikan konsistensi dan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode-periode lain.

d) *Verifiability/traceability* (verifikasi/ditelusuri). Data capaian kinerja berupa capaian indikator kinerja input, output dan outcome pada tingkat kegiatan dan sasaran yang disajikan pada LAKIP harus dapat diuji kebenarannya melalui verifikasi dan penelusuran terhadap dokumen sumber capaian kinerja untuk masing-masing indikator.

e) *Timeliness* (tepat waktu) biasanya mempunyai keterkaitan dengan dua hal penting, yaitu frekuensi dan penangguhan. Frekuensi menunjukkan seberapa sering informasi dikinikan (*update*) dan diukur sebagai interval waktu antara dua laporan yang berisi informasi sejenis. Penangguhan, yaitu panjangnya waktu yang habis (*expire*) dari saat selesai suatu kejadian sampai informasi ke tangan pengguna. Makin lama “waktu yang habis” itu, sudah tentu makin berkurang kegunaannya bagi pengguna. Karena bagi pengguna informasi yang akan mengambil keputusan dengan informasi itu juga akan didesak oleh keterbatasan waktu. Dengan demikian, *response time* (waktu tanggapan) dari pengguna sangat diandalkan dalam melihat apakah informasi

itu masih berguna atau tidak. Sehingga dapat disimpulkan semakin terlambat informasi semakin kecil kegunaan dan nilainya bagi pengguna.

f) *Understandability* (dapat dimengerti). Laporan harus disajikan dapat dimengerti

g) *Prinsip lingkup pertanggungjawaban*. Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.

h) *Prinsip prioritas*. Yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.

i) *Prinsip Manfaat*. Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

j) *Mengikuti standar laporan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*.

2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas LAKIP

Menurut Gaspersz (2004), peningkatan kualitas LAKIP harus berorientasi pada hal – hal berikut, yaitu:

1. Membangun Budaya Organisasi berorientasi Akuntabilitas. Sasaran utama perbaikan adalah paradigma maupun pemikiran para aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur negara. Perubahan paradigma dimulai dari pemaknaan dan pemahaman kembali atas konsepsi akuntabilitas. Penanaman nilai (*value*) dan makna (*meaning*) konsepsi akuntabilitas tidak cukup dilakukan hanya dengan sosialisasi maupun workshop/seminar/ceramah, tetapi harus dilanjutkan dengan pengembangan nilai dan makna akuntabilitas tersebut menjadi sebuah karakter personal para aparatur dan budaya organisasi (*organization culture*).
2. Revisi Dokumen Perencanaan Kinerja. Sumber kesalahan dalam proses penyusunan LAKIP bermula dari dokumen renstra yang tidak mempunyai alur logika program yang jelas antara visi, misi, tujuan, sasaran dan program. Perlu dilakukan sinkronisasi dengan alur logika program yang logis.
3. Perumusan Indikator Kinerja Utama. Permenpan RB Nomor 29 tahun 2010, memberikan pedoman bahwa LAKIP harus melaporkan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Tingkatan Unit Kerja	Fokus pelaporan Kinerja
1	Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota	Pencapaian sasaran strategis yang bersifat hasil (<i>outcome</i>)
2	Unit kerja organisasi eselon I pada Kementerian/ Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (<i>outcome</i>) dan atau keluaran (<i>output</i>) penting
3	Unit kerja mandiri lainnya	melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (<i>output</i>) penting dan atau keluaran (<i>output</i>) lainnya

4. Peningkatan Kualitas Evaluasi Internal: a) Membangun sistem pengumpulan data kinerja yang handal, b) Peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi ini, tidak hanya sekedar dilakukan melalui berbagai pelatihan analisis kinerja, tetapi juga menuntut para penganggung jawab program dan kegiatan, betul-betul menguasai kegiatan yang dilakukan, baik kuantitatif maupun kualitatif, seperti latar belakang program, tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan serta hasil kegiatan/program dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam renstra.
5. Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Manajemen Kinerja. Jika informasi yang disajikan dalam LAKIP tidak memberikan informasi yang relevan dan signifikan dalam pengambilan keputusan, maka sudah barang tentu, laporan tersebut tidak akan digunakan oleh manajemen. hal ini juga harus diikuti dengan langkah penyediaan sarana dan prasarana bagi staf untuk mampu menyediakan informasi yang akurat dan bermanfaat, melalui penyediaan sistem pengumpulan data kinerja yang handal.

2.2 Anggaran Berbasis Kinerja

Adalah system penganggaran yang berorientasi pada 'output' organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi. Anggaran Berbasis Kinerja mengalokasikan sumberdaya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai 'output measurement' sebagai indikator kinerja organisasi (Bastian, 2006). Penganggaran berbasis kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas atau kegiatan. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara *output* dan *input*. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dengan *input* yang sama, atau *output* yang dihasilkan

adalah sama dengan *input* yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada system anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan terukur juga penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

Berbeda dengan penganggaran tradisional, yang disusun dengan orientasi *output*. Jadi, apabila kita menyusun anggaran dengan pendekatan kinerja, maka *mindset* kita harus focus pada "apa yang ingin dicapai". Kalau focus ke "output", berarti pemikiran tentang "tujuan" kegiatan harus sudah tercakup disetiap langkah ketika menyusun anggaran. Sistem ini menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa. Jadi, tingkat keberhasilan system anggaran ini adalah *performance* atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu system penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Penyusunan APBD berbasis kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah dituntut lebih responsive, transparan dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat (Mardiasmo,2006).

2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Sebuah sasaran anggaran tidak hanya rencana keuangan yang menetapkan biaya dan tujuan pendapatan untuk pusat tanggung jawab dalam bisnis perusahaan, tetapi juga perangkat untuk pengendalian (*control*), kerja sama yang terpadu, komunikasi, evaluasi kinerja, dan motivasi, Pengetahuan tentang tujuan dianggarkan (*feedforward*) dan informasi tentang sejauh mana tujuan-tujuan telah dicapai (*feedback*) memberikan dasar bagi para manajer untuk mengukur efisiensi, lalu mengidentifikasi masalah, dan mengendalikan biaya.

Menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dapat dimengerti oleh mereka yang

bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Locke (1968) dalam Bangun (2009) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif. Hal ini akan mendorong karyawan/staf untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja.

Locke (1968) dalam Bangun (2009) menyatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidajelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Kenis (1979) menemukan bahwa pelaksana anggaran memberikan realisasi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap pegawai terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksanaan anggaran secara signifikan jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Kenis juga menyatakan bahwa anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya dan pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sisi lain anggaran juga merupakan alat bagi manajerial SKPD untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya. Jones dan Pendelbury (1996) dalam Bangun (2009) mengatakan anggaran seharusnya bisa memotivasi secara optimal terhadap pegawai, begitu juga Mardiasmo (2006) mengatakan anggaran merupakan alat motivasi bagi pegawai.

Riyanto (2003) dalam Bangun (2009) menyatakan hubungan karakteristik anggaran, dalam hal ini kejelasan sasaran anggaran, dengan kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor individual yang bersifat *psychological attributes*. Efektif atau tidaknya kejelasan sasaran anggaran sangat ditentukan oleh *psychological attributes*. Sehingga faktor-faktor individual tersebut sangat dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran dalam menilai kinerja manajerial SKPD. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai. Pencapaian kinerja ini akan terkait dengan motivasi, dimana hal ini disebabkan dengan motivasi yang tinggi akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Dengan kata lain, kinerja manajerial akan dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran.

2.4 Audit Intern

Tugiman (2006), audit intern adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Tunggal

(1995), mendefinisikan internal audit adalah aktivitas penilaian secara independen dalam suatu organisasi untuk meninjau secara kritis tindakan pembukuan keuangan dan tindakan lain sebagai dasar untuk memberikan bantuan bersifat proteksi (melindungi) dan konstruktif bagi pimpinan perusahaan. Menurut Robert Tampubolon (2005), audit intern lebih berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang. Sedangkan tujuan pelaksanaan audit intern adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

Audit intern dalam pemerintahan berupa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern yaitu Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern tersebut terdiri dari :

- Pengawasan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
- Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja.
- Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Sistem AKIP diimplementasikan secara *“self assessment”* oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan system dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi oleh pihak yang lebih independen menurut Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah

Kabupaten/Kota atau Inspektorat Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2.5 Pengembangan Hipotesis

Menurut Suparmono dan Utami (2004), hipotesis adalah harapan peneliti yang berkenaan dengan hubungan dua atau lebih variabel yang kebenarannya perlu diuji lebih lanjut melalui pengumpulan data. Suparmono dan Utami (2004) juga menjelaskan bahwa perumusan hipotesis harus berdasarkan pada penalaran yang mampu memberikan penjelasan yang rasional. Oleh sebab itu, penting untuk menelusuri tinjauan teoritis untuk mendapatkan pengarahannya mengenai jenis variabel dan hubungannya.

Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan uraian sebelumnya adalah :

- H1: Anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan audit intern berpengaruh terhadap kualitas LAKIP secara simultan.
- H2: Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kualitas LAKIP.
- H3: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kualitas LAKIP.
- H4: Audit intern berpengaruh terhadap kualitas LAKIP.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer dan pengumpulan datanya menggunakan teknik kuisisioner yang menggali persepsi dari setiap pimpinan atau kepala SKPD. Data diperoleh dengan cara meminta setiap kepala SKPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Batanghari untuk mengisi kuisisioner yang akan di bagikan. Menurut Sugiyono (2009), kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya dan terakhir diserahkan kembali kepada peneliti. Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert* disebut pula dengan *summated-rating scale*, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ghozali (2005:41) skala yang sering di pakai dalam penyusunan kuisisioner adalah skala ordinal dalam bentuk skala *likert* yang berisi lima tingkat preferensi jawaban. Dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari 3 (tiga) variabel yakni Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), Audit Intern (AI), dan Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas LAKIP SKPD (KLS). Indikator penyusunan variabel bebas merupakan indikator formatif, karena merupakan antededen atau penyebab (*causal indicators*). Model persamaan pengaruh langsung antara lain:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

atau:

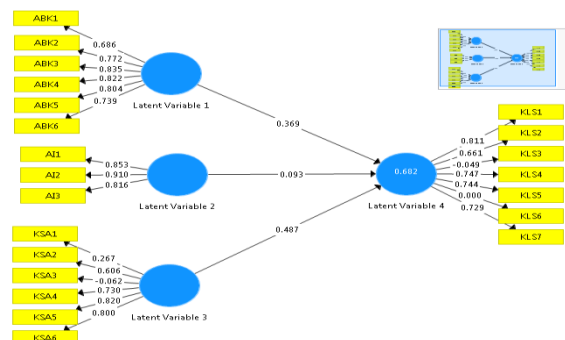
$$KLS = \beta_0 + \beta_1 ABK + \beta_2 AI + \beta_3 KSA + e$$

Dimana:

- Y = KLS adalah Kualitas LAKIP SKPD
- β_0 = Intercept atau konstanta
- X1 = ABK adalah Anggaran Berbasis Kinerja
- X2 = AI adalah Audit Intern
- X3 = KSA adalah Kejelasan Sasaran Anggaran
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

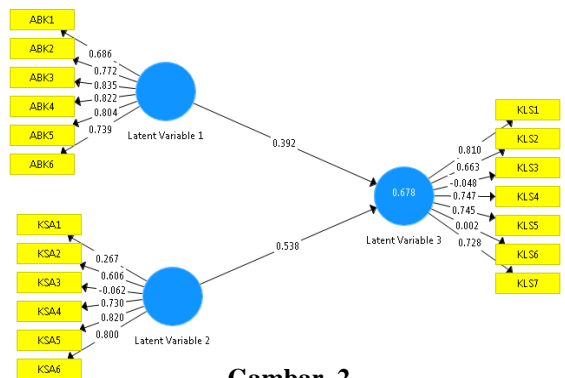
Model Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Audit Intern terhadap Kualitas LAKIP SKPD dengan menggunakan aplikasi smartPLS 3.2.1 menunjukkan sebagai berikut, yakni **Model Awal** pada gambar berikut ini:



Gambar. 1
Konstruksi Diagram Jalur hasil pemodelan PLS

Nilai *outer loading* pada variabel indikator Audit Intern $\geq 0,5$ maka variabel tersebut dihilangkan dari model, sehingga konstruk diagram jalur hasil pemodelan PLS setelah dimodifikasi sebagai berikut:

4.1 Variabel Audit Intern dikeluarkan dari model



Gambar. 2
Konstruksi Diagram Jalur Hasil Pemodelan PLS Setelah Di Modifikasi

4.1 Evaluasi Outer Model

4.1.1 Indicator Reliability

Model struktural yang diteliti menunjukkan hubungan antara indikator dengan masing-masing variabel yang ditunjukkan dengan besarnya nilai bobot faktor.

Tabel. 1
Outer Loading

Indikator	Latent Variable 1	Latent Variable 2	Latent Variable 3	Latent Variable 4
ABK1	0,686			
ABK2	0,772			
ABK3	0,835			
ABK4	0,822			
ABK5	0,804			
ABK6	0,739			
KSA1			0,267	
KSA2			0,606	
KSA3			-0,062	
KSA4			0,730	
KSA5			0,820	
KSA6			0,800	
AI1		0,853		
AI2		0,910		
AI3		0,816		
KLS1				0,811
KLS2				0,661
KLS3				-0,049
KLS4				0,747
KLS5				0,744
KLS6				0,000
KLS7				0,729

Sumber : Data Diolah.

Jika nilai *outer loading* lebih dari 0,7 maka variabel indikator perlu dipertahankan untuk penelitian uji teori sedangkan untuk penelitian eksplorasi antara 0,5-0,7 dan bila kurang dari 0,5 maka variabel indikator harus dihilangkan.

4.1.2 Discriminant Validity

Mengukur seberapa jauh suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lainnya. Nilai *discriminate validity* yang tinggi memberikan bukti bahwa suatu konstruk mampu menangkap fenomena yang diukur. Cara menguji *discriminant validity* pada penelitian ini digunakan *cross loading* variabel indikator terhadap variabel laten. Jadi untuk item yang nilainya tidak lebih besar dari variabel latennya akan dikeluarkan dari model.

Tabel. 2
Cross Loading

Indikator	Latent Variable 1	Latent Variable 2	Latent Variable 3	Latent Variable 4
ABK1	0,686	0,485	0,437	0,504
ABK2	0,772	0,353	0,395	0,472
ABK3	0,835	0,382	0,434	0,550

ABK4	0,822	0,428	0,437	0,546
ABK5	0,804	0,385	0,369	0,515
ABK6	0,739	0,498	0,502	0,613
KSA1	0,078	0,108	0,267	0,144
KSA2	0,387	0,452	0,606	0,526
KSA3	-0,023	0,157	-0,062	-0,045
KSA4	0,457	0,423	0,730	0,520
KSA5	0,347	0,489	0,820	0,620
KSA6	0,488	0,646	0,800	0,586
AI1	0,507	0,853	0,624	0,604
AI2	0,390	0,910	0,563	0,489
AI3	0,502	0,816	0,547	0,502
KLS1	0,615	0,516	0,560	0,811
KLS2	0,426	0,355	0,474	0,661
KLS3	-0,127	-0,017	0,052	-0,049
KLS4	0,439	0,456	0,582	0,747
KLS5	0,477	0,428	0,588	0,744
KLS6	0,044	-0,024	-0,013	0,000
KLS7	0,429	0,295	0,516	0,729

Sumber : Data Diolah.

4.1.3 Internal Consistency

Nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* yang digunakan $\geq 0,6$. Berikut hasil perhitungan *internal consistency* pada tabel 4.5 dan tabel. 3:

Tabel. 3
Composite Reliability

Latent Variable	Composite Reliability	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja	0,901	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,895	Reliabel
Audit Intern	0,729	Reliabel
Kualitas LAKIP SKPD	0,757	Reliabel

Sumber : Data Diolah

Hasil pengujian pada tabel. 3 menunjukkan bahwa semua konstruk atau variabel penelitian ini sudah menunjukkan sebagai pengukur yang *fit*.

Tabel. 4
Reliabilitas Konstruk (Construct Reliability)

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Anggaran Berbaris Kinerja	0,868	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,824	Reliabel
Audit Intern	0,567	Tidak Reliabel
Kualitas LAKIP SKPD	0,638	Reliabel

Sumber : Data Diolah.

Hasil pengujian pada tabel. 4 menunjukkan bahwa semua konstruk atau variabel penelitian ini

sudah menunjukkan sebagai pengukur yang *fit* hanya variabel audit intern yang tidak reliabel. Dan hasil uji reliabilitas ini menyatakan bahwa analisis selanjutnya dapat dilakukan.

4.1.3 Convergent Validity

Average Variance Extracted (AVE) digunakan untuk mengevaluasi *convergent validity*. Nilai AVE harus lebih dari 0,5.

Tabel. 5
Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE
Anggaran Berbasis Kinerja	0,605
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,740
Audit Intern	0,381
Kualitas LAKIP SKPD	0,392

Sumber : Data Diolah.

Dari tabel. 5 di atas dapat dilihat bahwa variabel anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai AVE $\geq 0,5$, sedangkan variabel audit intern dan kualitas LAKIP SKPD memiliki nilai AVE $\leq 0,5$.

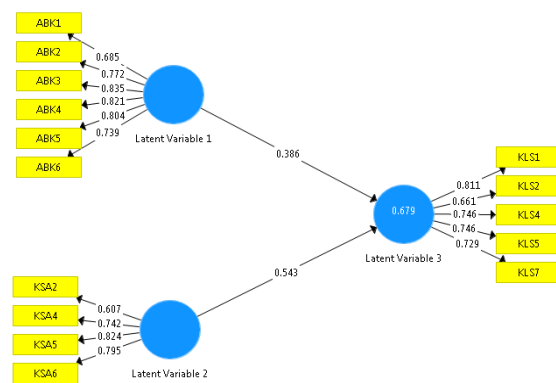
4.2 Evaluasi Inner Model

4.2.1 Koefisien Determinasi (R²)

Secara Umum nilai $R^2 \geq 0,75$ adalah baik. Dari hasil pengolahan data pada penelitian ini di peroleh nilai *R-square* sebesar 0,682 yang berarti model regresi memiliki tingkat goodness of fit yang baik dan variabel Kualitas LAKIP SKPD dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Audit Intern sebesar 68,2%, sedangkan 31,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

4.2.2 Signifikansi dan Besarnya Koefisien Model Struktural

Pengujian model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural di evaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen uji t serta sigifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Berikut gambar diagram jalur hasil pemodelan PLS pada masing-masing *manifest* atau indikator **Model Akhir** pada gambar berikut ini:



Gambar. 3
Konstruksi Diagram Jalur Hasil Pemodelan PLS (Model Akhir)

4.3 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kualitas LAKIP SKPD

Hasil uji koefisien indikator pada variabel penerapan anggaran berbasis kinerja menunjukkan nilai loading factor dan AVE nya $\geq 0,5$ dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LAKIP SKPD secara parsial. Berdasarkan *Path Diagram* di atas, pengaruh langsung yang ditimbulkan oleh Variabel Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kualitas LAKIP SKPD adalah senilai 0,386.

Hal ini sesuai dengan penelitian Amri (2012) menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas LAKIP SKPD. Pada pemerintah kabupaten Batanghari sudah menerapkan penyusunan anggaran yang berbasis kinerja yang dapat meningkatkan secara signifikan terhadap nilai LAKIP Kabupaten. Hal ini disebabkan karena perencanaan strategis dalam hal menegakkan akuntabilitas (pengukuran kinerja), pelaksanaan rencana, pemantauan pelaksanaan, dan penyediaan umpan balik untuk masyarakat sehingga ada perubahan yang positif di berbagai bidang secara terus-menerus sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari sehingga kualitas LAKIP yang dihasilkan menjadi baik.

4.4 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kualitas LAKIP SKPD

Hasil uji koefisien indikator pada variabel kejelasan sasaran anggaran menunjukkan nilai loading faktor dan AVE nya $\geq 0,5$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LAKIP SKPD secara parsial. Berdasarkan *Path Diagram* di atas, pengaruh langsung yang ditimbulkan oleh Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kualitas LAKIP SKPD adalah senilai 0,543.

Hasil pengujian tersebut menggambarkan secara keseluruhan bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan kualitas LAKIP SKPD. Hal ini sesuai dengan penelitian Anjarwati (2012) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Adanya pengukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam bentuk mekanisme evaluasi, maka dapat diketahui kinerja suatu organisasi. Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam pemerintahan dibutuhkan pembagian wewenang atau pendelegasian yang tepat.

4.5 Pengaruh Audit Intern Terhadap Kualitas LAKIP SKPD

Hasil uji koefisien indikator pada variabel audit intern menunjukkan nilai loading faktor nya $\geq 0,5$ tetapi nilai AVE audit intern $\leq 0,5$. Dan nilai *Path Diagram* yang menunjukkan besaran pengaruh langsung Audit Intern terhadap kualitas LAKIP SKPD kecil sekali sebesar 0,093. Maka variabel audit intern tidak valid dan signifikan sehingga variabel tersebut dihilangkan dari model. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Amri (2012) yang menyatakan bahwa audit intern secara parsial berpengaruh terhadap kualitas LAKIP SKPD.

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karakteristik Tim LAKIP SKPD dan Tim LAKIP Kabupaten Batanghari yang cenderung mengabaikan Audit Intern dalam proses penyusunan LAKIP. Tentu saja, tidak ada karakteristik tim penyusunan LAKIP audit yang berlaku sama untuk setiap organisasi. Aktivitas tim penyusunan LAKIP di satu organisasi dapat berbeda dengan organisasi yang lain dalam struktur, proses, ukuran, jumlah staf, tools dan teknik yang digunakan, budaya organisasi, dan lain-lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menyebabkan satu indikator bisa berlaku di satu organisasi namun tidak bisa berlaku di organisasi yang lain. Namun, betapapun bervariasi aktivitas tim penyusunan LAKIP dan teknik yang digunakan, pengukuran kinerja di mana-mana satu pada tujuan yaitu peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas ditunjukkan dengan kesesuaian operasional aktivitas tim penyusunan LAKIP terhadap kerangka praktik profesi, berjalan secara efektif dan efisien, serta senantiasa mengarah ke perbaikan dan peningkatan dalam mendukung pencapaian misi organisasi.

4.6 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Audit Intern Terhadap Kualitas LAKIP SKPD

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Menurut Bastian (2006), Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. Friska (2014) menyatakan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dikatakan berhasil, jika realisasi anggaran tercapai dengan maksimal dan keseluruhan proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat menghasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang berkualitas dari semakin maksimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja.

Kejelasan sasaran anggaran juga merupakan salah satu faktor yang dapat menghasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang berkualitas, dimana menurut Ginting (2009), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Agar Anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan LAKIP yang berkualitas maka diperlukan audit intern. Menurut Tugiman (2006), audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Amri (2012) yang menyatakan bahwa variabel independen (anggaran berbasis kinerja, pertanggungjawaban belanja dan audit intern) secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran

anggaran dan audit intern berpengaruh secara simultan pada kualitas LAKIP SKPD.

2. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan hanya penerapan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran yang berpengaruh secara parsial terhadap kualitas LAKIP SKPD. Sedangkan audit intern tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas LAKIP SKPD.
3. Model *Partial Least Square* pada penelitian ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang merefleksikan Audit Intern merupakan indikator-indikator positif dan signifikan. Namun pengaruh langsung Audit Intern terhadap Kualitas LAKIP SKPD sangat lemah dan tidak signifikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan focus penelitian bukan hanya terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan audit intern sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor yang mempengaruhi kualitas LAKIP SKPD serta bukti adanya pengaruh dan keterkaitan antar variable-variabel tersebut secara teoritis.
2. Populasi penelitian ini adalah aparat setingkat Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit, Kepala Sub dan Kepala Seksi di pemerintah kabupaten Batanghari, tanpa melihat unsur-unsur non kepala yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran, seperti di antaranya pegawai negeri sipil sebagai staf, DPRD sebagai pengawas legislatif.
3. Disarankan kepada SKPD untuk penanggung jawab dan pelaksana kegiatan agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, kerjasama dengan BPKP dan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP).

DAFTAR REFERENSI

- Amri, Subhan. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pertanggungjawaban Belanja dan Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Thesis. Universitas Sumatera Utara.
- Anjarwati, Mei. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang : Semarang.
- Avionita, Venni. 2013. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah*. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Widyatama.
- Bangun, Andarias. 2009. *Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*. Thesis. Universitas Sumatera Utara.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
-, 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Dharma, Surya. 2004. *Manajemen Kinerja: Falsafah, Teori, dan Penerapannya*. Program Pascasarjana FISIP: Jakarta.
- Evita, Yenni. 2014. *Faktor-Faktor Rendahnya Capaian Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditinjau Dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Unsur Pengendalian Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi*. Tesis. Universitas Jambi.
- Fachruzzaman dan Norman. 2010. *Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bengkulu*. SNA XIII Purwokerto. 2010.
- Friska, Indriani Yulia. 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)*. Tesis. Universitas Jambi.
- Garrison, N & Brewer. 2013. *Akuntansi Manajerial Edisi 14 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

- Ginting, S.H. 2009. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Karo* (Tesis). Sumatra Utara : Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Handoko, T. Hani.2012. *Manajemen*. Edisi Kedua. Yogyakarta ; BPFE
- Hall, (Tahun 2001:27). *Sistem Informasi*
- Halim, A & Theresia, D. 2007.*Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harjanti, Heti Purwita. 2009. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Depok*. Tesis. Universitas Padjajaran. Jawa Barat.
- Heidrajrachman, dan Husnan Suad. 2002. *Manajemen Personalia*. BPFE: Yogyakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, *Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Melekat*.
-, Nomor 7, Tahun 1999. *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Jogiyanto. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- LAN dan BPKP, 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance* (Modul Sosialisasi Sistem AKIP). Modul 1 dari 5, Jakarta: LAN.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta :UII Press.
-, 2013.*Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen Konsep Manfaat dan Rekayasa*, Edisi III. Jakarta : Salemba Empat.
- Mustafa EQ. Z. 2009. *Mengurai Variabel Hingga Instrumensi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Nasution,Ahmad Fawzi. 2013.*Pengaruh Kecukupan Anggaran, kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Kota Medan*.Skripsi.Universitas Negeri Medan.
- Nordiawan, D. 2006.*Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Priyatno, Duwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Cetakan Ketiga. Media Kom: Jakarta.
-, 2010. *Paham nalisa Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta : MediaKom
- Peraturan Pemerintah Nomor 60, Tahun 2008. *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Riduwan. 2010. *Rumus Dan Data Dalam Analisis Statistika*.CV Alfabeta: Bandung.
- Santoso, Singgih.2013. *Menguasai SPSS 21 di era informasi*
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat: Jakarta.
- Simamora, H. 2012. *Akuntansi Manajemen Edisi III*. Riau :Star Gate Publisher.
- Sugiono.2012. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta: Bandung
- Sujiyanto, A.E. 2009. *Aplikasi Statistik Dengan SPSS 16.0*, Jakarta : Prestasi Pustaka
- Surat Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003. *Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Syafriar 2009. *Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan ANGGARAN, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun*.
- TAP MPR RI Nomor: IX/MPR/1998.*Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.
- Waworuntu, Resti Hanastasia dan Treesje Runtu. 2014. *Analisis Perubahan Sistem Penganggaran di Indonesia dan Pengaruhnya pada Kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara*.Jurnal EMBA Vol.2 No. 3.
- Widarjono, Agus. April 2015. *Analisis Multivariat Terapan dengan program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Widyantoro, Ari Eko. 2009. *Implementasi Performance Based Budgeting : Sebuah Kajian Fenomologis*. Tesis. Semarang : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.